

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

**(Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)**

Oleh: Wardatul Amniyah, Zainur dan Moh. Zainol Arief.

Pedagang Kaki Lima adalah mereka yang berjualan biasanya di atas trotoar maupun bahu jalan yang menggunakan gerobak atau mobil pick-up. Mereka sangat mudah ditemui dimanapun, keberadaan mereka tidak akan menimbulkan permasalahan jika tidak melanggar aturan yang ada. Pelanggaran yang sering mereka langgar adalah berkaitan dengan adanya gangguan fungsi jalan, kerusakan jalan atau fasilitas di ruang jalan serta mengganggu keindahan tata kota.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari PERDA Nomor 03 Tahun 2002 tersebut tidak berjalan efektif. Serta untuk mengetahui bagaimana peranan dari Aparat Penegak Hukum dalam mengatasi permasalahan para pedagang kaki lima.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Sosio Legal. Untuk Pendekatan masalah menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis. Jenis Data atau Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Jenis Data Primer dan Sekunder.

Kenyataan bahwa Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ini belum berjalan secara efektif, khususnya di area Jalan Diponegoro dan jalan Seludang. Peran dari Aparat Penegak Hukum Peraturan Daerah Kecamatan/Kota ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Peran aparat penegak hukum dalam permasalahan ini adalah yang utama, karena itu adalah tugas dari adanya Satpol PP. Mereka sudah menjalankan tugas, fungsi dan wewenang mereka dengan baik. Namun karena tidak ada kesinambungan atau keharmonisan antara PKL dan Satpol PP maka permasalahan ini tidak kunjung terselesaikan.

Implementasi dari Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya kurang efektif, karena kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang yaitu DISPERINDAG mengenai PERDA Nomor 03 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum. Serta peran dari Aparat Penegak Hukum ini juga melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan. Untuk kedepannya diharapkan kepada tugas yang berwenang untuk melakukan tugas mereka dengan lebih baik lagi, serta kepada masyarakat juga lebih mematuhi aturan yang sudah ada. Agar tercipta keselarasan dan kedamaian kepada semua masyarakat Kabupaten Sumenep.

**Kata Kunci : Ketertiban, Umum, Pedagang, Kaki, Lima.**

## **ABSTRACT**

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 03 YEAR  
2002 CONCERNING GENERAL DUTIES AGAINST FIVE-FOOT TRADERS  
BY LAW ENFORCEMENTS  
(Case Study in Sumenep District)**  
**By: Wardatul Amniyah, Zainur and Moh. Zainol Arief.**

*Street Vendors are those who usually sell on sidewalks and shoulders using carts or pick-up cars. They are very easy to find anywhere, their existence will not cause problems if it does not violate existing rules. Violations that they often violate are related to the disruption of road functions, damage to roads or facilities in the road space and disturb the beauty of urban planning.*

*The purpose of this research is to analyze why the PERDA is not effective. And to find out how the role of Law Enforcement Officers in overcoming the problems of street vendors.*

*This study uses the Sosio Legal research method. To approach the problem using a research approach Sociological Juridical .. Types of Data or Sources of legal materials used are Primary and Secondary Data Types.*

*The fact that the implementation of Regional Regulation 03/2002 concerning Public Order has not been effective, especially in the area of Jalan Diponegoro and Jalan Seludang. The role of the District / City Regional Law Enforcement Officials is the Civil Service Police Unit or Satpol PP. Their role in this issue is primary, because it is the task of Satpol PP. They have carried out their duties, functions and authority well. However, because there is no continuity or harmony between PKL and Satpol PP, this problem has not been resolved.*

*The implementation of this Regional Regulation is less effective in its implementation, due to the lack of socialization by law enforcement officials regarding the PERDA. As well as the role of the Law Enforcement Officials, it is also to curb street vendors who do not have a trading license. In the future, it is expected that the tasks of the authorities are to carry out their duties better, and to the community also to comply more with existing rules. In order to create harmony and peace to all people of Sumenep Regency.*

**Keywords : Order, General, Trader, Street vendors**